

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melihat dunia internasional sekarang ini, adalah melihat dunia yang secara konstan selalu berubah-ubah. Usaha dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia internasional serta mencari cara terbaik dalam menanggapi, merupakan dasar mulai meningkatnya minat dan berkembangnya studi hubungan internasional pada era modern ini. Studi hubungan internasional terdahulu yang muncul dan berkembang tidak bisa dipisahkan oleh trauma yang ditimbulkan akibat terjadinya Perang Dunia 1.

Dimana minat dan perkembangan studi hubungan internasional kala itu adalah difokuskan pada pertanyaan “bagaimana perang itu terjadi”¹ dan tidak jauh dalam ranah studi hubungan internasional sebagai landasan studi diplomasi untuk berkembang, selain itu juga sebagai respons dari keinginan masyarakat dunia internasional dalam mencegah terjadinya konflik antar negara internasional yang berkelanjutan.

Namun seiring perkembangan zaman, studi hubungan internasional kini memiliki peran yang lebih relevan dan kontemporer. Yaitu dengan dunia yang kita ketahui semakin berkembang maju dan semakin terhubung melalui globalisasi, perdagangan, internet, migrasi, dan masih banyak lagi. Menciptakan berbagai

¹ Burchill, S & Linklater, A. (1996). “*Theories of International Relations*”.

masalah mendesak yang dirasakan para aktor-aktor HI dalam dunia internasional. Yaitu dengan keadaan dunia internasional yang selalu berubah-ubah, hal tersebut menciptakan situasi dimana para aktor HI diperlukan pemahaman yang tinggi dalam memahami berbagai fenomena internasional untuk dapat bertahan hidup dari berbagai perubahan yang terjadi, serta dapat mempersiapkan diri dan beradaptasi dalam perubahan keadaan yang akan datang.

Oleh karenanya di era modern ini, studi hubungan internasional berusaha menjelaskan berbagai aspek interaksi antar aktor-aktor HI dalam ruang lingkup global, dan juga mencoba menjelaskan interaksi negara-negara lain yang perilakunya berasal dari satu negara dan ditujukan kepada anggota negara lain. Jika dilihat melalui lensa analisis hubungan internasional, negara merupakan aktor utama dalam ruang lingkup global dan segala aktivitas seperti kebijakan yang diberlakukan akan berpengaruh pada banyak aktor tidak hanya di dalam negara, tetapi juga di luar negara (secara transnasional). Karena studi hubungan internasional didasarkan pada interaksi yang terjadi antar aktor negara, terdapat urgensi dalam memahami interaksi kerjasama antar aktor negara.

Dengan adanya kepentingan untuk negara agar dapat bertahan hidup dan terus berkembang dari segala perubahan kontemporer, hubungan internasional memberikan jembatan kesempatan dalam membantu mewujudkan kepentingan nasional tersebut. Kepentingan nasional seperti keinginan negara dalam menjaga kemakmuran masyarakatnya melalui peningkatan kualitas ekonomi merupakan sesuatu yang pasti akan selalu ada dalam strategi kepentingan nasional negara dalam dunia internasional. Oleh karenanya, melalui studi hubungan internasional

dapat diamati bahwa banyak negara dalam dunia internasional banyak melakukan interaksi kerjasama melalui aktivitas perdagangan.

Perdagangan secara sederhana merupakan bentuk dari interaksi antar aktor individu dalam memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup, sementara dalam memahami perdagangan internasional definisinya tidak jauh dari definisi sederhana perdagangan yang dilakukan antar aktor individu. Namun keputusan politik negara dalam perdagangan internasional memiliki keberadaan yang aktif dalam berjalannya interaksi perdagangan internasional.

Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya ialah perubahan pasca Perang Dingin, yang mana dengan berakhirnya Perang Dingin terjadinya pergeseran paradigma HI yakni dari Geo-politik ke Geo-ekonomi.² Perubahan ini memperngaruhi perdagangan internasional yang mana dengan adanya perbedaan tingkat dan keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara serta perbedaan pada letak wilayah geostrategi yang dimilikinya, hal ini merefleksikan langsung pada tingkat *Power* yang dimiliki negara serta keuntungan dalam pemanfaatan sumber daya yang mana dengan sumber daya yang terbatas tersebut memungkinkan negara dalam mewujudkan berbagai kepentingan nasionalnya.

² Sayyidati, A. (2017). *“Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional”*.

1.1.1. Indonesia Sebagai Negara Strategis

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak diantara dua Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, selain itu Indonesia juga terletak diantara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan keadaan ini, Indonesia dengan mudah menjadi salah satu negara yang diberkahi dengan keunggulan *Power* serta berbagai keuntungan lain berkat letak geografisnya. Salah satunya seperti kenyataan bahwa Indonesia dapat berpotensi menjadi jalan persimpangan lalu lintas dunia, yaitu melalui lalu lintas udara ataupun persimpangan lalu lintas laut.³

Dari hal tersebut Indonesia dengan mudah mewujudkan salah satu kepentingan yang sangat dijunjung oleh Alfred Thayer Mahan (1890), mengenai pentingnya negara dalam menguasai laut.⁴ Yakni Indonesia berpotensi dapat berperan sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara internasional seperti Jepang, Korea, dan China dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa.

Ditambah lagi, akibat letak geografisnya yang strategis, hal ini telah menciptakan keadaan iklim yang membuat Indonesia sebagai negara agraris terkemuka. Dengan hanya adanya dua musim yang dialami Indonesia yaitu musim hujan dan kemarau, hal ini menciptakan keadaan

³ Kemlu. "Geografi".

⁴ Mahan, A. T. (1890). "The Influence of Sea Power upon History".

ideal dalam pengembangan dan pemanfaatan sektor industri pertanian. Hasil dari sektor ini mencakup hasil pangan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi yang mana sangat berguna dalam kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia, ataupun digunakan sebagai pemanfaatan pengejaran kepentingan nasional melalui aktivitas perdagangan internasional.

Dalam aktivitas perdagangan internasional, salah satu sektor industri pertanian perbankan Indonesia yang tercatat telah memberikan hasil dengan nilai keuntungan tertinggi adalah Minyak Kelapa Sawit “*Crude Palm Oil* (CPO)”. Minyak Kelapa Sawit adalah minyak nabati yang dihasilkan dari proses ekstraksi dari buah kelapa sawit (*Elaeis guineensis*). Buah kelapa sawit memiliki daging yang kaya akan minyak, yang diekstraksi melalui proses fisik dan kimia untuk menghasilkan CPO.⁵ Dalam prosesnya, buah kelapa sawit melalui berbagai tahapan seperti pemisahan, penggilingan, pemisahan inti dan cangkang, serta pemurnian yang lebih bertahap hingga menghasilkan CPO layak digunakan untuk konsumsi seperti produksi minyak goreng, margarin, dan produk olahan lainnya ataupun CPO sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, sabun, deterjen, dan industri bioenergi, khususnya produksi *Biodiesel*.⁶

Biodisel adalah jenis bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber alami, terutama minyak nabati atau lemak hewani. Jenis bahan

⁵ Walter Ajambang Nchu. (2015). “*Molecular Analysis of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Flowering Associated Genes and their Potential Application in Breeding Programmes*”.

⁶ PT. Tunas Harapan Sawit. “*Proses Pengolahan & Produksi*”.

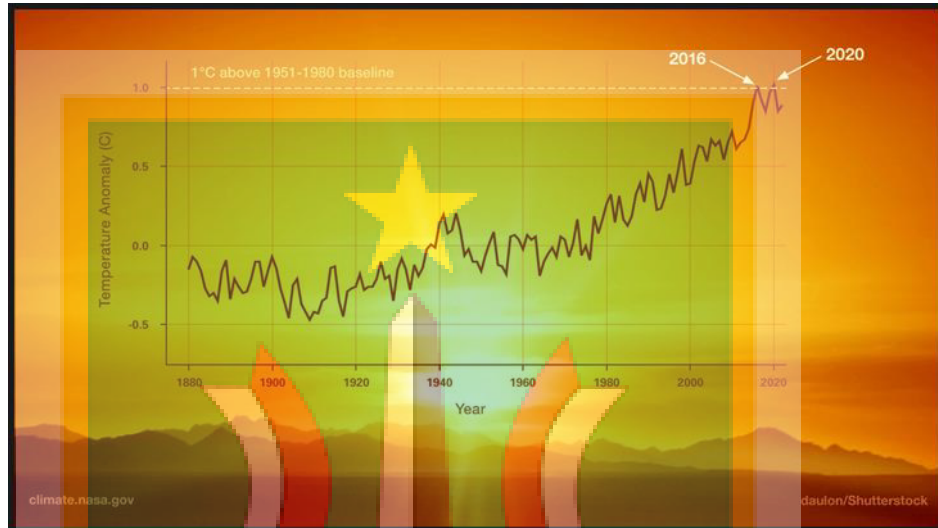
bakar ini, adalah alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dari pada bahan bakar fosil seperti *Diesel* konvensional, karena *Biodiesel* memiliki tingkat emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan dapat diperbarui (produksinya berpotensi tidak terbatas).

Selain itu, terdapat alasan mendalam akan mengapa komoditas CPO mulai menjadi unggulan, adalah fakta bahwa negara-negara di dunia internasional (terutama negara industri) mulai mencari cara untuk mendapatkan energi perbankan yang ramah lingkungan. Seperti yang kita ketahui, sejak periode pra-industri, aktivitas manusia mulai meningkat secara signifikan, dan hal ini telah menyebabkan peningkatan pada suhu rata-rata Bumi sekitar 1 derajat Celcius (1,8 derajat Fahrenheit). Selain itu, data dari tahun-tahun sebelumnya, telah menunjukkan bahwa selalu terjadi peningkatan dalam pemanasan global yaitu sekitar 0,2 derajat Celcius (0,36 derajat Fahrenheit) dan terus meningkat pertahunnya.⁷

Peningkatan suhu ini secara jelas disebabkan oleh aktivitas manusia sejak tahun 1950-an, dimana dengan hadirnya kemajuan dalam bidang teknologi, industri, serta transportasi yang mana mendorong laju pergerakan ekonomi dunia, hal tersebut telah mendorong maraknya penggunaan bahan bakar fosil dan peningkatan suhu berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun. Perubahan suhu global yang cepat ini menimbulkan perhatian serius karena dampaknya yang luas pada lingkungan, manusia, dan ekosistem.

⁷ Nasa.gov. "Global Warming vs. Climate Change".

Upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari pemanasan global ini.



Tabel Gambar 1. *Ilustrasi grafik pemanasan global yang drastis pada 2016-2020.*

Sumber: [nasa.gov/global warming vs climate change](https://climate.nasa.gov/global-warming-vs-climate-change).

Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh *NASA's Goddard Institute for Space Studies*⁸ tersebut, aktivitas industrialisasi, serta maraknya penggunaan transportasi berbasis bahan bakar fosil yang berlebih telah menciptakan peningkatan efek rumah kaca pada lapisan ozon, dan dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini diprediksi akan mengakibatkan efek yang sangat berbahaya pada keberlangsungan hidup di Bumi ini. Oleh

⁸ Nasa.gov. "Global Warming vs. Climate Change".

karnanya, banyak negara-negara di dunia internasional, terutama yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau “*United Nations*” (UN) berkumpul untuk membahas isu ini.

Pertemuan ini pertama kali diadakan pada September 2000, di New York, Amerika Serikat dengan sebutan *Millennium Summit*, yang mana hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan dalam “*8 point in Millennium Development Goals for 2015*”. Selain itu pertemuan *Millennium Summit* ini juga menciptakan kesepakatan terbaru yaitu “*Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk kehidupan di 2030”.⁹ Secara singkat, salah satu point dalam SDGs ataupun MDGs yang sangat berperan dalam penelitian ini adalah kesepakatan negara-negara internasional akan pentingnya menjaga lingkungan serta penggunaan energi alternatif yang lebih perbankan dari bahan bakar fosil.

Dari keputusan tersebut, dapat dikatakan bahwa banyak negara yang mulai mencari bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil negara mereka. Oleh karenanya, hal ini telah menjadi salah satu dasar dalam mulai meningkatnya *Demand* pada komoditas *Biodiesel* dalam pasar internasional. Sehingga, Indonesia serta banyak negara-negara di dunia, mulai melakukan pengembangan yang pesat dalam produksi pertanian komoditas *Biodiesel*, terutama dalam komoditas CPO dengan tujuan melakukan ekspor ke negara-negara pembeli komoditas CPO seperti India, China, Amerika Serikat, Negara-negara di Eropa, dan masih banyak lagi.

⁹ Kementerian PPN/Bappenas. “*Sekilas SDGs*”.

Dengan meningkatnya *Demand* pada komoditas *Biodiesel* di pasar internasional, banyak negara penghasil komoditas *Biodiesel* dapat merasakan dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan ekonominya. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (2012) yang dikutip melalui karya Tuti Ermawati & Yeni Saptia (2013), “*KINERJA EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA*”. Akibat dari peningkatan *Demand* pada komoditas *Biodiesel* di pasar internasional,

“*Produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 17,54 juta ton pada tahun 2008 menjadi 23,52 juta ton pada tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,7% per tahun pada periode 2008-2012*”.¹⁰

Sementara, dalam melihat keuntungan yang dihasilkan dari perkembangan tersebut, adalah:

“*Pada tahun 2004, nilai ekspor CPO Indonesia ke dunia sebesar USD 1,06 miliar atau 1,74% dari total ekspor Indonesia, dan terus mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2012 menjadi USD 8,42 miliar atau 4,43% dari total ekspor Indonesia*”.¹¹

Dari hal ini, tidak hanya Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi banyak negara-negara di dunia internasional. Dengan tingkat *Demand* yang signifikan dalam pasar internasional, banyak negara-negara produsen CPO di dunia memanfaatkan keadaan tersebut hingga mereka dapat melakukan berbagai pengembangan dalam

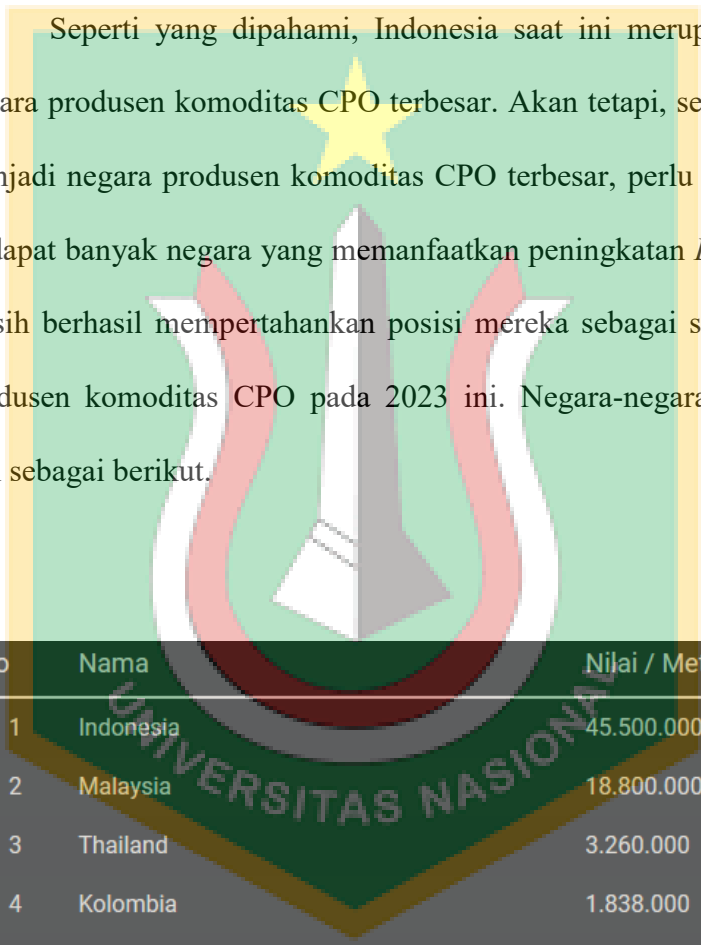
¹⁰ Ermawati, T., & Saptia, Y. (2013). “*Kinerja Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia*”.

¹¹ Ibid.

negaranya, dan menjadikan CPO sebagai salah satu fokus dalam sumber pendapatan negaranya.

1.1.2. Negara-negara Penghasil CPO

Seperti yang dipahami, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara produsen komoditas CPO terbesar. Akan tetapi, sebelum Indonesia menjadi negara produsen komoditas CPO terbesar, perlu diketahui bahwa terdapat banyak negara yang memanfaatkan peningkatan *Demand* dan kini masih berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu negara produsen komoditas CPO pada 2023 ini. Negara-negara tersebut antara lain sebagai berikut.



No	Nama	Nilai / Metrik Ton
1	Indonesia	45.500.000
2	Malaysia	18.800.000
3	Thailand	3.260.000
4	Kolombia	1.838.000
5	Nigeria	1.400.000
6	Guatemala	910.000

Tabel Gambar 2. Negara Produsen Sawit Terbesar 2022-2023.

Sumber: *United States Department of Agriculture (USDA)*.

Seperti yang disajikan dari data oleh *United States Department of Agriculture (USDA)*, Indonesia telah menjadi negara produsen terbesar dalam 2022-2023. Dengan tingkat produksi mencapai 45,5 juta Metrik Ton. Kemudian produsen terbesar selanjutnya disusul oleh Malaysia, yang mana Malaysia didasarkan pada kenyataan bahwa mereka merupakan negara pertama yang memajukan ekspor CPO sejak tahun 1970. Tetapi walaupun Malaysia merupakan negara pengekspor pertama, kedudukannya sebagai negara pengekspor terbesar mulai menurun hingga kedudukannya dapat diambil alih oleh Indonesia. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa produksi CPO Malaysia tetap mengalami pengembangan yang signifikan setiap tahunnya, sebab Malaysia dapat mencapai produksi sebesar 19,3 pertahun, atau sekitar 25 persen dari total produksi global, hingga pada tahun 2022-2023 total produksi CPO Malaysia mencapai 18,8 juta Metrik Ton.¹²

Setelah Indonesia dan Malaysia, negara yang juga memanfaatkan keuntungan dari CPO antara lain adalah Thailand dan Kolombia. Seperti data yang ditunjukkan oleh *USDA*, Thailand menduduki peringkat ketiga sebagai negara produsen CPO dengan produksi sebesar 3,26 Metrik Ton pada tahun 2023. Tetapi perlu diketahui pula bahwa Thailand juga mampu menghasilkan produksi CPO sekitar 3,45 juta pertahunnya. Hal ini juga dibantu fakta bahwa Thailand juga sedang ditengah usaha untuk meningkatkan produktivitas CPO mereka, yang mana dengan menjalankan

¹² Kusnandar, V. B. (2023). “Produsen CPO Terbesar Dunia, RI-Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit”.

program pengembangan industri perkebunan CPO dalam kurun waktu 10 tahun mendatang yang juga dibantu oleh sejumlah petani kecil di Thailand. Setelah Thailand, negara yang berlokasi di Amerika Selatan yaitu Kolombia dapat menduduki peringkat keempat sebagai negara produsen CPO di dunia. Kedudukan Kolombia ini dibantu oleh fakta bahwa Kolombia telah bergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) sejak tahun 2018, yang mana membantu Kolombia dalam menanggulangi permasalahan internal ataupun eksternal seputar CPO. Berdasarkan data dari USDA, produksi CPO negara ini hingga mencapai 1,83 juta Metrik Ton.¹³

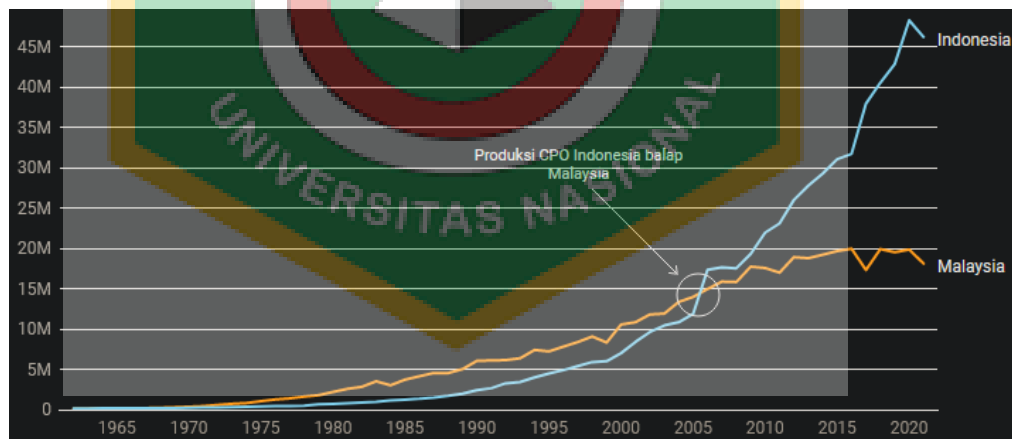
Dua negara selanjutnya adalah Nigeria dan Guatemala. Sekitar tahun 1996 hingga 2003, Nigeria pernah menjadi negara dengan produksi CPO ketiga terbesar di dunia, mengalahkan produksi Thailand kala itu. Tetapi pada 2023, produksi CPO Nigeria mencapai 1,4 juta Metrik Ton yang mana berkontribusi sekitar 1,8 persen dari total produksi CPO global. Negara yang terakhir dalam data dari USDA pada tahun 2023 adalah Guatemala yang mana mereka dapat menghasilkan komoditas CPO sekitar 910 ribu Metrik Ton pertahunnya. Selain itu, industri CPO Guatemala juga mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan tiap tahunnya, terutama di daerah perbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Karibia.¹⁴

¹³ Kusnandar, V. B. (2023). “Produsen CPO Terbesar Dunia, RI-Malaysia Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit”.

¹⁴ Koran Tempo. (2023). “11 Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia 2023, Indonesia Nomor 1”.

1.1.3. Penentu Harga CPO di Pasar Internasional

Dengan segala keuntungan geostrategi yang dimiliki Indonesia, yang mana telah menghantarkan Indonesia pada pencapaian dan pengembangan sektor pertanian CPO hingga Indonesia dapat menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia. Akan tetapi, hingga saat ini, Indonesia masih belum juga menjadi negara penentu harga CPO di pasar internasional. Hal tersebut dikarenakan, *title* tersebut masih dipegang oleh Malaysia, dan alasan mengapa Malaysia menjadi negara penentu harga CPO di pasar internasional, adalah fakta bahwa Malaysia merupakan negara pertama dan negara tertua yang menjadi produsen CPO terbesar di dunia kala itu.



Tabel Gambar 3. *Produksi CPO Indonesia VS Malaysia (ton) Periode 1962-2021.*

Sumber: *CNBC Indonesia.*

Dengan Malaysia menjadi negara penentu harga perdagangan CPO, Malaysia memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada jalannya perdagangan CPO di pasar internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang dipengaruhi oleh hal tersebut, yang mana Indonesia harus menyesuaikan harga perdagangan CPO-nya melalui harga mata uang Malaysia (Ringgit / RM), yang diatur dalam *Bursa Malaysia Derivatives* (BMD).¹⁵

Lantas mengapa Indonesia masih belum dapat merebut *title* tersebut dari Malaysia? Walaupun dalam kenyataannya Indonesia sudah melampaui Malaysia dalam produksi dan penjualan CPO sejak tahun 2005. Hal tersebut dikarenakan kenyataan bahwa banyaknya perusahaan perkebunan CPO yang ada di Indonesia ialah berasal dari Malaysia sendiri. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekitar tahun 2015 hingga tahun 2021, para investor di sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia berhasil mengumpulkan investasi dengan total mencapai 9,5 miliar dolar. Situasi ini seakan-akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki kendali terhadap produk utama yang dihasilkannya. Dengan kata lain, Indonesia masih bergantung pada Malaysia dalam hal produksi, perdagangan, serta penentuan harga komoditas kelapa sawit dan minyak kelapa sawit global.

Dengan mengetahui hal tersebut, Indonesia juga sudah memajukan berbagai usaha untuk melepaskan diri dari pengaruh penentuan harga oleh

¹⁵ Pane, L. G. H. (2022). “Diproduksi Indonesia, Ditentukan Malaysia”.

Malaysia. Akan tetapi, usaha yang dikerahkan Indonesia masih terbilang belum menghasilkan hasil yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan internal dan eksternal yang pada dasarnya tidak membolehkan Indonesia untuk *independent* dalam mengatur harga produk CPO-nya. Permasalahan Internal yang dihadapi Indonesia, adalah permasalahan seperti kenyataan bahwa Indonesia masih minim dalam pengawasan penuh dalam pengelolaan sektor perkebunan sawit-nya kala itu.

Selain itu, permasalahan Eksternal yang dihadapi adalah permasalahan seperti kenyataan bahwa Malaysia berkali-kali melakukan tindakan yang dinilai mensabotase pasar CPO Indonesia dengan maksud membuat Indonesia untuk tetap berada dalam pengaruh penentuan pasar Malaysia. Salah satu contoh dari aksi ini adalah pada tahun 2013, yang mana Malaysia melakukan Revisi Pajak Ekspor CPO, dan berdasarkan data dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joefly J. Bahroeny dalam pertemuan *8th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2013 Price Outlook*. Beliau menyatakan bahwa, “Malaysia akan menerapkan PE progresif sebesar 4,5 persen saat harga CPO mencapai MYR2.250 hingga MYR2.400 per metrik ton (MT) sampai maksimal 8,8 persen untuk harga CPO di kisaran MYR3.450 sampai MYR3.600 per MT”.¹⁶

¹⁶ Antara News. (2012). “Revisi Pajak Malaysia Ancam Daya Saing CPO”.

Aksi Malaysia tersebut dinilai sangat membatasi kinerja ekspor CPO Indonesia saat itu, terutama dalam kinerja ekspor Indonesia pada pasar internasionalnya. Namun berbagai permasalahan tersebut mulai perlahan diatasi oleh pihak-pihak Indonesia. Hingga, pada tahun 2023, akan ada usaha penekanan terbaru yang dikerahkan oleh Indonesia yang mana menteri perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan perencanaan baru dalam pembentukan harga acuan sendiri (sehingga tidak harus lagi berpacu pada harga CPO Malaysia). Pernyataan beliau tersebut, diharapkan untuk bisa diwujudkan secepat mungkin kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Beliau juga menambahkan komentarnya dalam Pembukaan Rapat Kerja BAPPEBTI, di Kementerian Perdagangan, yaitu:

"Beberapa kali di sidang kabinet disinggung masa kita ikut dengan Malaysia yang punya sawit kita tapi kita ikut Malaysia, yang jelek siapa ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia".¹⁷

Komentar beliau tersebut sangat mencerminkan frustrasi permasalahan internal yang dihadapi Indonesia yang mana pasar Indonesia masih berpacu pada penentuan Malaysia. Selain itu, dalam usaha perwujudan keinginan pelepasan oleh Indonesia tersebut, telah diadakan beberapa rapat penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) CPO, salah satunya adalah di Provinsi Lampung pada periode bulan Januari 2023.

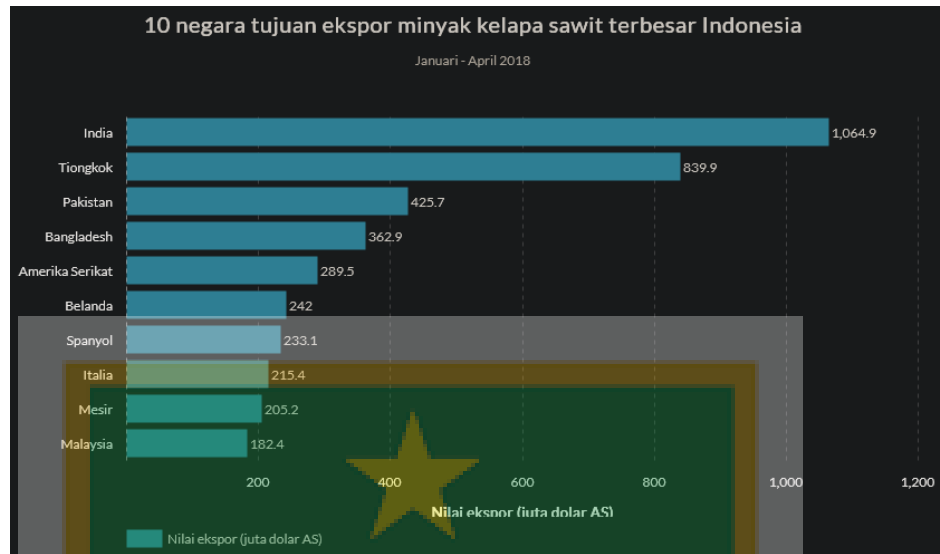
¹⁷ Kementerian Perdagangan RI. (2023). "Catat! Harga Sawit RI Tak Lagi Diatur Malaysia Mulai Juni 2023".

Yaitu Rapat tersebut, dipimpin oleh kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Ir. Feriyansyah yang mana dari rapat ini menghasilkan keputusan penetapan harga TBS CPO yang berpedoman dalam peraturan menteri pertanian republik Indonesia No. 01 mengenai PERMENTAN 2018, yang mana dengan maksud melindungi petani dari harga CPO yang tidak stabil.¹⁸

Walaupun dengan berbagai usaha yang dikerahkan Indonesia pada tahun 2023 untuk menentukan harga pasar CPO-nya sendiri. Tetapi perlu diketahui pula, bahwa selama Indonesia masih berada dalam pengaturan harga yang ditentukan Malaysia, nilai produksi dan perdagangan CPO Indonesia terbilang sangat kuat. Hingga walaupun ditengah pengaruh dari ketentuan harga pasar CPO Malaysia, Indonesia tetap dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dari penjualan produksi CPO-nya. Penyebab utamanya dikarenakan berkat mulai meningkatnya *Demand* pada komoditas CPO di dunia internasional. Tidak hanya itu, bahkan berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018.¹⁹

¹⁸ Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. (2023). “Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Bulan Januari 2023”.

¹⁹ Badan Pusat Statistik. (2018). “10 Negara Tujuan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Terbesar Indonesia”.



Tabel Gambar 4. 10 Negara Tujuan Ekspor CPO Terbesar Indonesia Tahun 2016.

Sumber: *Badan Pusat Statistik.*

Pada awal 2018 lalu, nilai ekspor pada minyak kelapa sawit Indonesia mencapai 5,87 miliar USD dengan India sebagai mitra dagang yang tertinggi dengan memberikan keuntungan sebesar 1,06 miliar dolar USD atau 18,1 persen dari total nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Kemudian urutan ekspor CPO Indonesia tertinggi ke-2 adalah oleh China sebesar 839,9 juta dolar USD. Walaupun keuntungan yang diberikan melalui ekport kedua negara tersebut sangat tinggi, tetapi mayoritas pasar internasional CPO Indonesia yang selalu stabil dalam memberikan keuntungan ialah melalui pasar internasional kumpulan negara-negara di Uni Eropa seperti Belanda (USD 242 juta), Spanyol (USD 233,1 Juta), Italia (USD 215,4 Juta), dan masih banyak lagi.²⁰

²⁰ Badan Pusat Statistik. (2018). “10 Negara Tujuan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Terbesar Indonesia”.

1.1.4. Munculnya Potensi Penghambat Perdagangan CPO

Seperti yang kita pahami, hasil dari pertemuan *Millennium Summit* tahun 2000 hingga 2015, serta kesepakatan dari “*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk kehidupan di 2030”. Telah membuat banyak negara di dunia internasional, mulai mencari bahan bakar alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil, dan pada tahun 2009, Uni Eropa sebagai perwakilan dari kolektif negara-negara di Eropa, membuat kebijakan *Renewable Energy Directive I* (RED I), yang mana secara singkat menganjurkan kepada negara-negara Uni Eropa untuk lebih memfokuskan “penggunaan dan produksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan”. Seperti yang tertera dalam kebijakan RED I, No (1) yaitu;

*“The control of European energy consumption and the increased use of energy from renewable sources, together with energy savings and increased energy efficiency, constitute important parts of the package of measures needed to reduce greenhouse gas emissions and comply with the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and with further Community and international greenhouse gas emission reduction commitments beyond 2012”.*²¹

Perlu diketahui pula, bahwa isi dari kebijakan RED I yang dibuat pada 2009 tersebut, terus mengalami berbagai amandemen tiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan RED I selalu menyesuaikan pada poin-poin yang ada dalam pertemuan *Millennium Summit* tahun

²¹ European Union. (2009). “*Directives*”.

2000, tetapi diketahui pula, bahwa isi dari pertemuan tersebut juga terus dilakukan amandemen hingga tahun 2015. Selain itu, hasil dari pertemuan *Millennium Summit* 2015 juga dikembangkan kembali dalam isu “*Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk kehidupan di 2030”.²² Sehingga, dapat disimpulkan bahwa isi dalam kebijakan Uni Eropa RED I, selalu dapat berubah untuk dapat menyesuaikan pada permasalahan penting yang sedang dihadapi, yang mana permasalahan seputar lingkungan dan SDGs menjadi fokus Uni Eropa saat itu. Sehingga sebagai respons, banyak negara-negara anggota Uni Eropa yang mulai bertransisi ke energi perbankan.

Sebagai bagian dari usaha pengembangan SDGs, negara Uni Eropa juga ikut serta dalam perdagangan internasional yaitu melalui pengembangan produksi komoditas *Biodiesel* mereka sendiri. Namun, akibat iklim negara Uni Eropa kurang cocok untuk melakukan penanaman minyak kelapa sawit (CPO), negara-negara di Uni Eropa mengembangkan produksi minyak nabati mereka sendiri menggunakan hasil panen seperti minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak biji bunga matahari. Walaupun demikian, berdasarkan data dari Asian Agri 2018, minyak nabati yang dihasilkan oleh tanaman alternatif tersebut tidak memiliki kualitas, jumlah, dan efisien yang sama seperti CPO.²³ Oleh karenanya, hal ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya *Demand* komoditas CPO pada pasar internasional kala itu.

²² Kementerian PPN/Bappenas. “*Sekilas SDGs*”.

²³ Asian Agri. (2018). “*Mengapa Dunia Membutuhkan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan?*”

Dengan mulai meningkatnya *Demand* pada komoditas bahan bakar *Biodiesel*. Hal ini menjadi titik awal dimana CPO mulai menjadi komoditas terlaris di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan ledakan *Demand* dalam komoditas tersebut, yang mana menghantarkan Indonesia sebagai negara terkaya dalam nilai ekspor komoditas *Biodiesel* berbasis CPO. Walaupun ekspor komoditas CPO Indonesia meningkat secara drastis, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Yaitu pada akhir 2018, yang mana Uni Eropa mulai melakukan amandemen lagi kebijakan RED I menjadi kebijakan RED II, dan mulai diberlakukan isi kebijakan tersebut pada akhir 2018.

Renewable Energy Directive II (RED II), menganjurkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mendukung aksi negara-negara produsen minyak nabati dengan tidak terlalu bergantung pada komoditas CPO sebagai dasar bahan bakar perbankan (dengan kata lain, melakukan pembatasan pembelian pada produk CPO mereka),²⁴ dan Uni Eropa juga menganjurkan untuk negara-negara anggota untuk mulai memfokuskan pada pengembangan industri dan produksi minyak nabati alternatif mandiri yang lebih terfokus pada nilai-nilai SDGs.²⁵ Keberadaan kebijakan Uni Eropa ini, mendapatkan respon yang sangat baik pada usaha negara-negara anggota Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi masalah deforestasi yang tidak ada habisnya pada negara tropis, sekaligus meningkatkan dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan

²⁴ European Union. (2009).

²⁵ Palm Oil Today. (2018). “*Trilogue Negotiation to Determine Palm Biofuels Ban.*”

alternatif selain pemanfaatan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai dasar dalam bahan bakar *Biodiesel*.²⁶

Namun sebaliknya, aktifnya kebijakan RED II ini dinilai sangatlah membatasi aktivitas negara-negara mitra pengimpor CPO ke Uni Eropa, dan salah satu diantaranya adalah Indonesia. Indonesia seperti yang kita ketahui adalah negara produsen CPO terbesar di seluruh dunia,²⁷ dan sebagai negara produsen CPO terbesar, keberadaan kebijakan RED II sangatlah menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Akan tetapi keadaan Indonesia tersebut dirasa sebagai sesuatu yang tidak terlalu menjadi hal yang negatif dalam pandangan Uni Eropa terhadap komoditas CPO, sebab dengan Uni Eropa membatasi masuknya komoditas CPO sebagai salah satu sumber energi perbankan. Uni Eropa berhasil mewujudkan kedudukannya dalam usaha memajukan nilai dalam SDGs, yang mana negara-negara Uni Eropa menilai pengelolaan yang dilakukan oleh negara-negara produsen CPO, yaitu sekitar aktivitas serta pengembangan komoditas CPO masih dikelilingi dengan hal-hal yang bersifat merusak keadaan lingkungan hidup.

Selain itu, kebijakan RED II juga hadir sebagai respons negara-negara Uni Eropa untuk memenuhi *Paris Agreement on Climate Change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations*

²⁶ Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2017). “*Daya saing minyak sawit dan dampak renewable energy directive (RED) Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia di pasar Uni Eropa*”.

²⁷ Nuraini. (2022). “*Ini 5 Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Ada Indonesia*”.

*Framework Convention on Climate Change (the 'Paris Agreement')*²⁸.

Pada bagian recitals RED II, No (81) menetapkan bahwa:

*“Indirect land-use change occurs when the cultivation of crops for biofuels, bio liquids and biomass fuels displaces traditional production of crops for food and feed purposes. Such additional Demand increases the pressure on land and can lead to the extension of agricultural land into areas with high-carbon stock, such as forests, wet lands and peatland, causing additional greenhouse gas emissions”.*²⁹

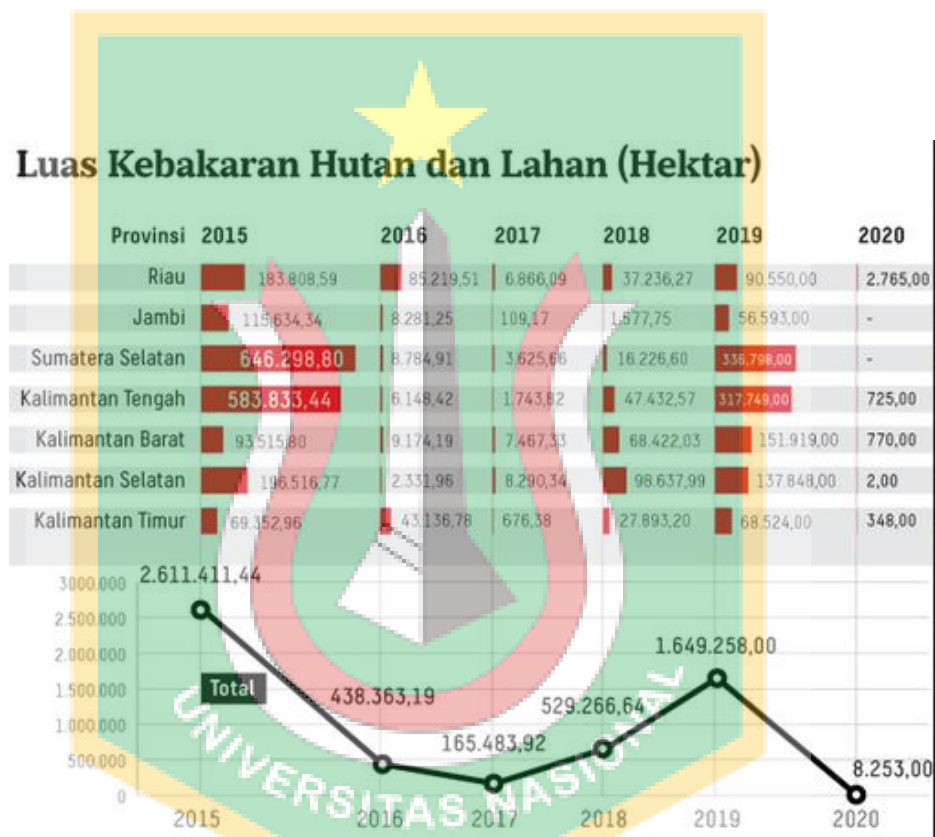
Dengan kata lain, meningkatnya *Demand* pada komoditas CPO, membuat negara-negara mitra produsen komoditas CPO (yang mayoritas memiliki daerah hutan hujan) mulai berlomba-lomba melakukan deforestasi untuk membuka lahan baru (dengan merusak daerah hutan tersebut) guna melakukan penanaman minyak kelapa sawit supaya hasil CPO tersebut dapat diperdagangkan untuk memenuhi *Demand* pasar internasional yang mana akan menghasilkan profit lebih banyak. Aksi tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan nilai dan tujuan SDGs internasional, serta kebijakan RED II Uni Eropa.

Indonesia sebagai industri produsen komoditas CPO terbesar juga dinilai oleh Uni Eropa sebagai negara produsen CPO yang masih kurang serius dalam menanggapi masalah perusakan lingkungan hidup di

²⁸ IEF. (2021) *“The Promise and Challenges of COP26”*.

²⁹ European Union. (2018). *“Directives”*.

negaranya. Berdasarkan kebijakan RED II, Indonesia dinilai sebagai negara dengan tingkat kerusakan hutan yang paling tinggi di antara negara produsen lainnya. Sebagai salah satu contoh point yang RED II kritik terhadap Indonesia, adalah merujuk pada kasus kebakaran hutan terbesar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2015, di Kalimantan Tengah.



Tabel Gambar 5. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Hektar).

Sumber: Sipongi KLHK.

Dalam kasus tersebut Indonesia telah kehilangan sekitar 2,6 juta hektar hutannya. Selain itu, pembakaran hutan tersebut juga membuat Indonesia berkontribusi sekitar 1,8 miliar ton emisi gas rumah kaca, serta

efek samping perubahan iklim yang ditimbulkan akibat pelepasan zat-zat kimia dari pembakaran lahan gambut juga menghasilkan sekitar 72% emisi udara.³⁰ Indonesia juga telah kehilangan 24 juta hektar wilayah hutan dalam kurun waktu 2001 hingga 2017, dan 14 juta hektare dari lahan tersebut digunakan sebagai lahan CPO,³¹ dan diperkirakan 23% dari terjadinya kasus deforestasi di Indonesia adalah akibat ekspansi area perkebunan CPO.³²

Dengan melihat keadaan tersebut, mulai terlihat alasan mengapa Uni Eropa mulai menilai CPO sebagai komoditas yang berkontribusi pada merusakkan alam dan berpotensi mengancam nilai-nilai SDGs secara global. Walaupun demikian, keadaan CPO sebagai sumber energi perbankan tidak bisa digoyahkan. Sebab sumber minyak nabati alternatif yang berusaha dikembangkan oleh Uni Eropa sama-sama memiliki masalah yang sama dengan CPO, yaitu komoditas hasil panen seperti minyak kedelai, minyak kanola, dan minyak biji bunga matahari yang akan dijadikan bahan dasar dalam produksi *Biodiesel* alternatif selain CPO, membutuhkan area tanam yang sangat luas (mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa untuk melakukan pembukaan lahan sama halnya seperti yang dilakukan oleh negara produsen CPO), serta ada juga kenyataan bahwa hasil akhir dari produksi komoditas-komoditas tersebut tidak memberikan hasil yang se-efektif CPO.

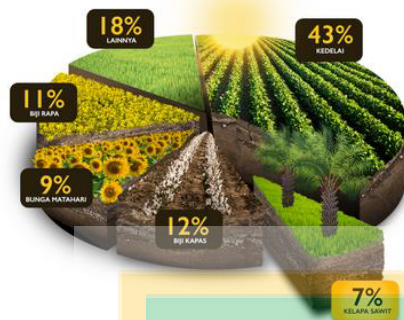
³⁰ Hooijer, A., Silvius, M., Wosten, H., and Page, H. S. (2006). "Peat-CO₂, Assessment of CO₂ emissions from drained peatlands in SE Asia".

³¹ Henry. (2019). "Lahan Sawit Renggut Kebahagiaan Warga Dayak Iban dan Orang Rimba".

³² Prastiwi, A. (2019). "Ironi di balik ekspansi sawit".

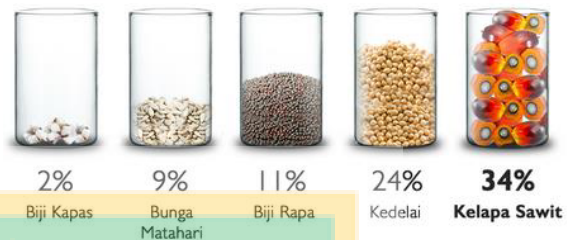
EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN

Total Lahan: 290 Juta Ha



PRODUKSI MINYAK

Total Produksi : 221 Juta Ton



Tabel Gambar 6. Perbandingan Efisiensi Penggunaan Lahan.

Sumber: *Oil World 2018*, Dikutip dari *ASIAN AGRICULTURE*.

Berdasarkan data yang disajikan oleh *Oil World 2018*, terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas komoditas CPO serta komoditas alternatif yang Uni Eropa berusaha kembangkan. Yaitu, dalam total luas lahan 290 juta hektar, komoditas CPO hanya membutuhkan luas lahan yang sedikit dan CPO dapat menghasilkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan komoditas lain. Antara lain seperti, Kacang Kedelai membutuhkan 43% luas lahan tanam dan dapat menghasilkan 24% minyak nabati; Biji Rapa membutuhkan 11% luas lahan tanam dan dapat menghasilkan 11% minyak nabati; Bunga Matahari membutuhkan 9% luas lahan tanam dan dapat menghasilkan 9% minyak nabati; Biji Kapas membutuhkan 12% luas lahan tanam dan dapat menghasilkan 2% minyak nabati. Tetapi CPO hanya membutuhkan 7% luas lahan tanam dan dapat menghasilkan 34% minyak nabati.

Selain itu, direktur *Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri*, Bernard Riedo juga menambahkan pemahamannya dalam wawancara yang mana beliau menyatakan bahwa:

“Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang paling produktif dan efisien dalam hal penggunaan lahan... Untuk menghasilkan volume produksi minyak yang sama, tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai, rapeseed dan bunga matahari membutuhkan lahan 6 kali lebih luas dibandingkan dengan kelapa sawit. Dengan demikian, jika ingin mengganti minyak kelapa sawit, maka potensi untuk terjadinya deforestasi besar-besaran semakin terbuka lebar untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia melalui tanaman-tanaman tersebut”.³³

Sehingga dapat dikatakan bahwa walaupun Uni Eropa membatasi ekspor CPO ke negara-negara anggotanya, CPO akan tetap menjadi komoditas terlaris di dunia internasional (berkat sifatnya yang perbankan), serta CPO akan tetap menjadi komoditas sumber daya alam andalan dalam ekonomi ekspor Indonesia. Sebab pada mula berlakunya RED II, berdasarkan data pada akhir tahun 2018, oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Menyatakan bahwa:

³³ Asian Agri. (2018). *“Mengapa Dunia Membutuhkan Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan”*.

“Produksi minyak sawit... pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton,... total ekspor perkebunan pada tahun 2018 mencapai 28,1 miliar dolar atau setara dengan 393,4 Triliun rupiah.”³⁴

Sehingga dapat sedikit disimpulkan, walaupun angka yang dihasilkan oleh CPO tersebut masih terbilang cukup besar, namun angka tersebut dapat bertambah jauh lebih besar jika efektivitas ekspor CPO Indonesia tidak terganggu oleh pembatasan kebijakan RED II yang sedang berlangsung di Uni Eropa pada 2018 lalu.

Keadaan mitra ekspor Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa mungkin terganggu dengan kebijakan RED II, akan tetapi efektivitas ekspor CPO Indonesia masih berjalan lancar dengan negara mitra lainnya seperti India, China, Amerika Serikat dan masih banyak lagi. Memahami masalah dari kemunculan kebijakan RED II tentu mendorong Indonesia untuk fokus dalam menjaga kualitas ekspor serta menjaga hubungannya dengan negara mitra saat ini.

³⁴ Limanseto, H. (2021). “Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan”.

1.1.5. India, Pasar Lama Yang Memiliki Potensi Sebagai Pasar baru

Fenomena kerjasama bilateral antar aktor HI, merupakan salah satu kajian dari studi hubungan internasional, yang mana studi hubungan internasional berusaha menjelaskan dasar alasan terjadinya interaksi antar aktor HI, dan apa hasil dari interaksi itu sendiri. Merefleksikan pemahaman ini pada tema penelitian, memberikan sedikit gambaran mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dibahas.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, intensitas kerjasama ekspor CPO Indonesia dengan negara mitra lain disebabkan oleh adanya pembatasan kebijakan RED II yang diberlakukan negara-negara mitra di Uni Eropa, hal ini membuat Indonesia kehilangan potensial penuh dari salah satu pasar utamanya. Oleh karenanya, Indonesia harus mulai mengeksport surplus CPO berlebih yang diakibatkan pembatasan RED II, dan mulai mengeksportnya kepada mitra negara-negara lain. Dalam hal ini, India merupakan salah satu negara yang Indonesia pilih dalam mulai melakukan kerjasama perdagangan sektor pertaniannya.

India adalah negara berkembang yang memiliki status *superior* dalam kawasan Asia Selatan. Status tersebut didapatkan oleh India melalui perkembangan kekuatan ekonomi yang dimilikinya, hingga perkembangan tersebut mulai diakui oleh dunia internasional. Berdasarkan data yang diberikan oleh IMF, India berhasil menjadi negara urutan ke-3 dalam status GDP terbesar di kawasan Asia dengan total sebesar 2,1 Triliun

dollar pada tahun 2015.³⁵ Salah satu faktor yang berkontribusi hingga India dapat menghasilkan angka tersebut, ialah berkat kualitas *Sumber Daya Manusia* (SDA) yang dimilikinya. Serta faktor yang menunjukkan bahwa walaupun India adalah negara berkembang, tetapi India mampu menjadi negara Industri yang cukup kuat dengan berbagai ragam komoditas ekspor. Seperti produk Farmasi, Produk manufaktur dan infrastruktur, Produk teknologi serta Produk transportasi.³⁶

Dari segala perkembangan industri yang dilakukan oleh India tersebut, dapat dikatakan India dengan mudah menjadi potensi kandidat terbaik untuk melakukan kerjasama perdagangan bahan bakar *Biodiesel* berbasis CPO. Sebab, berdasarkan data dari hasil *Conference of the Parties-26* pada tahun 2015, yang mana dilakukan penandatanganan *Paris Agreement* untuk membahas masalah iklim internasional, serta usaha negara-negara dalam mengurangi penumpukan gas rumah kaca demi mencegah pemanasan global hingga tahun 2030.³⁷ Menyebutkan bahwa negara industri (seperti India), merupakan *contributor* terbesar penumpukan gas rumah kaca pada lapisan ozon Bumi yang mana mencakup zat-zat limbah gas seperti karbondioksida, metana, dinitrogen oksida dan beberapa bahan kimia industri lainnya.³⁸

Sehingga dari kesepakatan *Conference of the Parties-26* tersebut, menciptakan penekanan kepada negara-negara industri di dunia

³⁵ IMF. (2021). "Statistic Times: List of Asian countries by GDP".

³⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia di India. "Profil India".

³⁷ IEF. (2021) "The Promise and Challenges of COP26".

³⁸ Ritchie, H. (2019). "who has contributed most to global co2 emissions?".

internasional untuk berperan aktif dalam usaha pengurangan emisi gas rumah kaca. India sebagai salah satu negara yang berkontribusi dalam meningkatnya emisi gas global,³⁹ perlu mulai menangani masalah tersebut dengan serius tanpa harus menyabotase produksi industri negaranya. Alhasil, aksi penanggulangan masalah tersebut adalah melalui proses transisi tipe bahan bakar lain, yang mana negara harus perlahan mulai beralih menggunakan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan guna mengurangi tingkat pencemaran udara akibat penggunaan bahan bakar fosil yang dihasilkan dari berbagai aktivitas industri.

Dari hal tersebut, Indonesia dengan mudah menjadi mitra dagang bahan bakar alternatif terbaik, sebab kerjasama bilateral antara Indonesia-India, sudah terjalin sangat baik bahkan sejarah *track record* antara keduanya dapat di telusuri hingga pada mulai terjadinya Perang Dingin. Interaksi politik pertama antara Indonesia-India, ditandai pada *Treaty of Friendship* pada tahun 1951. Kemudian dilanjutkan pada kesepakatan antara keduanya untuk menjadi negara *Non-Block* pada konferensi Asia-Afrika yang pelaksanaannya dilakukan di Bandung pada tahun 1955.⁴⁰

Selebih itu, interaksi kerjasama bilateral Indonesia-India bahkan mulai tampak seperti saudara jauh, dimana terdapat banyak foto *Archive* kerjasama yang tercipta antara kedua pemimpin negara yang baru menjabat, hingga kepemimpinan yang terdahulu bahkan sejak masa

³⁹ Ritchie, H. (2019). "who has contributed most to global co2 emissions?".

⁴⁰ Shekhar, V. (2007). "India-Indonesia Relations".

kepemimpinan presiden Soekarno dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dimana Indonesia-India bekerjasama dalam usaha mengembangkan negaranya di berbagai sektor seperti pemerintahan, ekonomi, bisnis, budaya, dan pendidikan.⁴¹

Sebagai tambahan dalam melihat keuntungan dari kerjasama bilateral antara Indonesia-India dalam pengejaran kepentingan negara, terdapat banyak keuntungan yang dinilai sangat menguntungkan satu sama lain secara *Long Run*. Salah satunya, seperti potensi dari timbal balik kerjasama pasar India dan Indonesia yang selalu akan membutuhkan komoditas *exclusive* atau komoditas langka yang hanya ada dimiliki negara masing-masing, serta keuntungan India dan Indonesia untuk melakukan perluasan pasar kepada negara-negara benua lain melalui kerjasama bilateral antara keduanya.

Dengan berbagai kenyataan ini, peneliti menilai dengan adanya sejarah yang kental dalam kerjasama yang dimiliki oleh Indonesia-India. Ditambah lagi keadaan industri produksi, serta pasar komoditas CPO Indonesia yang kurang stabil akibat pembatasan RED II oleh Uni Eropa, membuat interaksi perdagangan antara Indonesia dengan India (sebagai negara pembeli komoditas CPO Indonesia tertinggi) menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan dasar justifikasi pada penulisan penelitian.

⁴¹ Satria. (2012). "Melihat Kerjasama Indonesia-India Dalam Bingkai Foto".

1.1.6. Refleksi Studi Hubungan internasional Terhadap Penelitian

Dalam studi hubungan internasional kita selalu berusaha mempelajari dan meneliti bagaimana tindakan suatu aktor HI dalam berinteraksi dan merespon aktor lainnya di tengah keadaan dunia yang selalu berubah. Interaksi yang ditunjukkan oleh para aktor tersebut, biasanya selalu dikaitkan dengan pemikiran Realis di mana mereka harus dapat tetap bertahan hidup dalam jalan perubahan drastis yang mereka alami. “Kerjasama” merupakan salah satu bentuk dari hasil interaksi para aktor HI. Dengan bekerjasama para aktor memiliki peluang lebih besar untuk dapat tetap bertahan hidup dan juga menggunakan mutualitas tersebut untuk memajukan kepentingan mereka masing-masing. Secara singkat, Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

*“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional, sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”.*⁴²

Dengan keadaan perubahan dunia internasional yang tidak menentu, selalu terdapat peluang untuk melakukan penelitian terhadap

⁴² Perwita, A. A. B. & Yani, Y. M. (2005). “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”.

interaksi antar aktor tersebut. Sebab tidak semua interaksi “kerjasama” yang dilakukan oleh para aktor memiliki proses dan kesimpulan yang sama. Alhasil membuat penelitian studi hubungan internasional menjadi sesuatu yang bersifat tidak ada batas, sebab keadaan ruang lingkup internasional yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. Selalu memberikan kesempatan baru oleh para peneliti untuk mempelajari dan meneliti interaksi aktor yang sedang berlangsung.

Judul saat ini dipilih sebab penulis rasa terdapat materi signifikan yang dapat diteliti dari fenomena kerjasama antara Indonesia-India dalam tahun 2020-2022. Sebab fenomena kerjasama bilateral yang terjadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga. Seperti kemunculan tiba-tiba dari fenomena Pandemi Covid-19 yang merusak kestabilan ekonomi global dan membuat banyak negara (yang memiliki ekonomi lemah) terjebak dalam krisis sebab minimnya pengembangan SDGs negara mereka terutama dalam sektor kesehatan. Kemudian disusul oleh kekhawatiran dari pembatasan CPO oleh Uni Eropa yang mana mengancam kualitas ekspor negara mitra produsen komoditas CPO, dan masih banyak lagi. Bahkan dengan Indonesia menjadi ketua G-20 pada 2022 membolehkan Indonesia sedikit mengatur arah kerjasama internasional yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan ekonomi dengan negara-negara yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan inti yang jawabannya akan menjadi pembahasan pokok dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian yang penulis gunakan adalah: **Bagaimana langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam menjaga pasar komoditasnya, melalui kerjasama dengan India di tengah perubahan yang dilakukan Uni Eropa**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

- Untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan Indonesia dalam menjaga dan mengembangkan ekspor CPO
- Untuk mengetahui hasil dan perkembangan dari kerjasama bilateral Indonesia-India

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis sebagai seorang mahasiswa studi hubungan internasional berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi siapapun yang ingin membahas isu seputar topik kerjasama bilateral antara Indonesia-India di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, sistematika penulisan diperlukan guna memberikan gambaran singkat mengenai alur yang akan dibahas dalam penulisan, selain hal tersebut memudahkan pemahaman oleh pembaca, sistematika juga memudahkan penulis untuk tidak lepas dari jalur kajian pembahasan. Oleh karenanya bentuk sistematika penulisan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Dalam bab ini, peneliti berusaha menjelaskan point-point penting yang mana akan menjadi landasan atau pondasi utama, mengenai mengapa peneliti memilih tema kasus untuk dilakukan penelitian. Bagian dari pendahuluan tersebut, yang mana mencakup point seperti: -Latar Belakang kasus yang akan dikaji; -Rumusan Masalah yang akan muncul dari latar belakang tersebut; serta - Tujuan Penelitian; dan -Manfaat Penelitian yang akan didapatkan dari meneliti kasus.

BAB II KAJIAN PUSTAKA:

Dalam bab ini, peneliti berusaha menjelaskan korelasi dari berbagai teori-teori yang ada dalam kajian hubungan internasional, dan berusaha untuk menarik hipotesis singkat berdasarkan definisi serta pandangan tokoh yang melopori teori dan konsep tersebut. Sementara dalam membahas bagian di dalamnya, Kerangka

Teori berperan sebagai tahapan awal pada kajian pustaka yang mana akan dikembangkan lagi melalui prespektif *grand theory*, seperti Teori Liberalisme yang mana berasumsi positif terhadap dunia internasional. Seperti interaksi Kerjasama Bilateral dalam ranah Perdagangan Internasional yang kemudian di fokuskan pada teori ekonomi seperti Teori Merkantilisme hingga pada fokus terkecil yaitu Merkantilisme Adam Smith. Sementara itu, Penelitian Terdahulu (Literature Review) diperlukan untuk memberikesan novelty atau pembeda antara penelitian saat ini, dengan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN:

Dalam membicarakan seputar Metode Penelitian, adalah membahas usaha peneliti untuk mengolah kasus yang akan dibahas serta perkiraan bentuk dalam pembahasan dalam penelitian itu sendiri. Bagian dari bab ini memiliki poin seperti, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, serta Lokasi dan Jadwal Penelitian dilakukan.